

# Hambatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Listrik yang Berdampak Finansial pada Keuangan Negara

## B

## PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS

**SIMPULAN** TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 5 TEMA DI DALAMNYA

- ▶ Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas
- ▶ Akuntabilitas keuangan dan kinerja
- ▶ Potret penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas
- ▶ Permasalahan/hambatan utama dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas
- ▶ Gambaran Inefisiensi
- ▶ Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya
- ▶ Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas

## C.

### INFRASTRUKTUR JARINGAN LISTRIK



- ▶ Ketepatan kebijakan dan penetapan pembangunan jaringan listrik nasional
- ▶ Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk progres pembangunan jaringan listrik)
- ▶ Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi
- ▶ Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur jaringan listrik dalam pencapaian kebutuhan listrik nasional
- ▶ Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan
- ▶ Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi

Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

Sehubungan dengan topik Pembangunan Infrastruktur Jaringan Listrik pada Sektor Penguatan Insfrastruktur dan konektivitas dalam Agenda Prioritas Pengawasan 2022 diatas, Deputi Bidang Investigasi dapat berperan sebagai kontributor terkait permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan.

Deputi Bidang Investigasi telah melakukan pengawasan terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui berbagai penugasan, antara lain penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit klaim, audit penyesuaian harga, audit kerugian keuangan negara, dan kajian. Adapun hasil pengawasan Deputi Bidang Investigasi terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki korelasi langsung dengan keuangan negara terdapat pada penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit klaim dan audit penyesuaian harga.

Jumlah Proyek Infrastruktur Kelistrikan Terkendala Periode 2010 s.d. 2020

90

Total Nilai Hasil Audit (Rp)

4.55T

Berdasarkan laporan hasil pengawasan terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan selama periode 2010 s.d. 2020, terdapat 90 proyek terkendala dengan total nilai hasil audit Rp4,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menyebabkan semakin terbebannya keuangan negara.

Nilai Hasil Audit (Rupiah) berdasarkan Jenis Infrastruktur Kelistrikan dan Jenis Audit



Pembangunan infrastruktur kelistrikan terbagi menjadi dua kategori yakni pembangunan pembangkit listrik berupa pembangunan PLTA, PLTU, PLTG dan sebagainya beserta sarana pendukungnya, serta pembangunan jaringan listrik seperti pembangunan gardu induk maupun jalur transmisinya.



Berdasarkan data diatas, pembangunan pembangkit tenaga listrik lebih banyak lebih banyak mengalami kendala dibandingkan dengan pembangunan jaringan listrik. Hal ini terkait dengan kompleksitas pekerjaan yang lebih tinggi pada pelaksanaan pembangunan pembangkit dibanding jaringan listrik.

Permasalahan yang umumnya ditemui dalam pembangunan jaringan listrik yakni terkait dengan pembebasan lahan. Sedangkan pada pembangunan pembangkit selain adanya permasalahan pembebasan lahan, juga seringkali ditemui permasalahan terkait perubahan lingkup pekerjaan serta ketidaksesuaian volume pekerjaan.

Dari nilai Rp4,55 triliun tersebut, nilai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara memiliki porsi paling besar dibanding jenis audit lainnya yakni sebesar 61,13% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan negara terbebani *nett loss* sebesar Rp2,78 triliun selama pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tahun 2010 s.d. 2020 tersebut.

Beberapa modus kecurangan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara antara lain:

- 1) Rekayasa dalam proses pengadaan, baik dilakukan oleh calon penyedia barang/jasa maupun adanya kerjasama antara panitia pengadaan dengan calon penyedia barang/jasa;
- 2) Manipulasi dokumen kemajuan pekerjaan yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume atau spesifikasi di dalam kontrak; serta
- 3) Penyalahgunaan wewenang melalui penyelewengan dana untuk pembebasan lahan ataupun pelaksanaan proyek.

Atas risiko kecurangan tersebut, mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membuat mekanisme dan sistem yang membuat proses pengadaan dapat dilakukan secara transparan.
- b. Meningkatkan pengawasan di lapangan dan memperbaiki administrasi dokumentasi kemajuan pekerjaan pada saat pelaksanaan proyek.
- c. Memperbaiki sistem pencairan keuangan untuk membatasi kewenangan seseorang, misal dengan menambahkan beberapa tahapan verifikasi.



Untuk hasil pengawasan melalui penugasan audit klaim, terdapat nilai hasil audit sebesar Rp1,43 triliun, atau sebesar 31,29% dari nilai total keseluruhan. Nilai ini menunjukkan adanya inefisiensi anggaran selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan dalam proses penyerahan lahan kepada penyedia barang/jasa yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan proyek;
- 2) Perubahan lingkup pekerjaan akibat adanya perubahan desain maupun spesifikasi pekerjaan dari kontrak awal;
- 3) Keterlambatan pembayaran progres pekerjaan yang menyebabkan munculnya klaim pembebanan biaya oleh penyedia barang/jasa;
- 4) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi pelaksanaan proyek, misalkan perubahan peraturan pajak.

Mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut antara lain:

- a. Penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah lahan siap diserahkan ke penyedia barang/jasa.
- b. Menghasilkan perencanaan pekerjaan yang lebih matang melalui peningkatan survey lapangan dan reviu desain sebelum penandatanganan kontrak.
- c. Menyiapkan sumber pendanaan beserta jumlah anggaran yang pasti sesuai nilai kontrak pekerjaan.

Berbeda dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan audit klaim, audit penyesuaian harga tidak selalu identik dengan inefisiensi keuangan. Penyesuaian harga merupakan hak penyedia barang/jasa yang telah diatur dalam kontrak, khususnya bagi kontrak yang bersifat *multiyears*. Namun demikian dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang kontraknya bersifat lumpsum maupun tidak *multiyears*, terdapat pengajuan penyesuaian harga yang disebabkan oleh mundurnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari penyedia barang/jasa. Penyebab paling umum dari mundurnya jadwal pelaksanaan ini adalah keterlambatan penyerahan lahan ke pihak penyedia barang/jasa yang menyebabkan penyedia tidak dapat segera melaksanakan pekerjaan di lapangan. Konsekuensi dari mundurnya jadwal pelaksanaan di lapangan yakni penyedia barang/jasa menjadi dapat mengajukan penyesuaian harga terkait adanya perubahan harga satuan selama pelaksanaan proyek.

Nilai hasil audit penyesuaian harga selama pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tahun 2010 s.d. 2020 adalah sebesar Rp340 miliar atau setara 7,58% dari total nilai hasil audit keseluruhan.

### **Rekomendasi eksternal:**

Berdasarkan hasil analisis atas data hasil pengawasan terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tahun 2010 s.d. 2020 diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab permasalahan pembangunan seringkali bersumber dari tahap perencanaan sehingga ke depannya diperlukan peningkatan keandalan dalam output perencanaan untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di masa mendatang.

### **Rekomendasi internal:**

Terkait data hasil pengawasan yang digunakan dalam analisis ini yang bersumber dari *database* hasil pengawasan bidang investigasi, terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki demi peningkatan informasi yang lebih relevan dalam mendukung penyusunan kebijakan strategis antara lain:

1. Menambahkan informasi terkait penyebab munculnya kerugian keuangan negara, klaim, maupun penyesuaian harga agar dapat melihat sumber permasalahan sebenarnya, bukan sebatas penyebab koreksi audit.
2. Menambahkan nilai kontrak untuk dapat mengukur tingkat inefisiensi anggaran.
3. Menambahkan periode kejadian secara lebih spesifik.